

## Ribuan UMKM Abal-abal Ditemukan

**REMBANG (KR)** - Usaha Menengah/Kecil dan Mikro (UMKM) sudah puluhan tahun didungungkan oleh pemerintah pusat. Keberadaan UMKM di berbagai daerah tersebut dibawah naungan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi/UMKM. Secara reguler UMKM ini mendapat bimbingan sekaligus bantuan permodalan dari pemerintah. Hanya semata untuk mendapatkan bantuan permodalan dari pemerintah itulah, yang terjadi di wilayah Kabupaten Rembang sungguh fantastis. Di wilayah ini setelah mendapat penelitian dari kantor Disperindagkop setempat, terdapat ribuan UMKM "abal-abal". Artinya UMKM tersebut memang ada ( secara papan nama) namun tidak memiliki aktivitas usaha.

"Dari hasil penelitian, ternyata jumlahnya ribuan, bahkan mencapai angka 40 ribu UMKM, abal-abal. Mereka mendirikan UMKM hanya pamrih untuk mendapat bantuan dari pemerintah. Yang seperti ini harus kita hentikan," kata Bupati Rembang, H Abdul Hafid saat membuka bazar ramadan dan gelar UMKM di kompleks Taman Rekreasi Pantai Kartini (TRPK), Rembang, Selasa (4/4). Diakui oleh Bupati Hafid, keberadaan UMKM di wilayahnya terus tumbuh dan cukup mendongkrak perekonomian masyarakat. Terkait dengan UMKM abal-abal Bupati hanya menilai karena ketidaktahuan masyarakat, atau ada miss komunikasi, sehingga masyarakat kebingungan mencari usaha yang tepat. Bupati hanya menyarankan pihak Disperindagkop untuk pro aktif menggelorakan semangat berwirausaha di berbagai sektor melalui UMKM sekaligus upaya pembinaan kepada para pelaku UMKM. (Ags)-f

## Tangani Stunting dan Kemiskinan Butuh Peran Kades

**MAGELANG (KR)** - Untuk membantu pemerintah dalam menangani stunting dan kemiskinan ekstrim di desa, dibutuhkan peran seluruh stakeholder. Mulai dari pemerintah desa hingga pusat. Salah satunya Kepala Desa (Kades) yang langsung bersentuhan dengan subjek (masyarakat). Oleh karena itu, para Kades harus tanggap dan responsif terhadap sejumlah permasalahan di desa.

"Jika ada masalah dimasyarakat, Kepala Desa harus segera turun. Selesaikan dengan bijak. Otonomi saat ini, kades seperti Bupati. Punya wilayah dan masyarakat yang dipimpin. Punya anggaran dan dapat membuat kebijakan tanpa harus menunggu pemerintah pusat. Namun demikian, kebijakan yang dibuat tetap harus sesuai undang-undang," kata anggota DPR RI, Ir Sudjadi di hadapan 44 orang Kades dari empat kecamatan, yakni Kecamatan Ngablak, Grabag, Windusari dan Pakis, di Omah Kembang Kabupaten Magelang, Senin (3/4).

Terkait stunting dan masalah kemiskinan, mereka (Kades), diminta serius menanganinya. Sebab, Kades menjadi pintu pertama yang mengetahui apabila ada warga yang menderita kekurangan gizi atau stunting, serta adanya warga miskin. "Gerakan penanganan stunting dan kemiskinan, harus terus dilakukan. Salah satunya melalui peran ibu-ibu PKK desa, Posyandu, kader kesehatan di wilayahnya," pintanya.

Penanganan stunting dan kemiskinan yang disampaikan anggota DPR RI dari PDI Perjuangan tersebut, dalam 'Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan' dengan tajuk membangun desa yang berkeadilan dalam kemakmuran, dan memakmurkan dalam keadilan. Untuk menangani kasus stunting dan kasus desa miskin ekstrim, pemerintah sudah melakukan beberapa program, diantaranya pembangunan sarana air bersih, rumah swadaya, pembangunan embung dan saluran irigasi pertanian. Program pemerintah tersebut, bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, kata Sudjadi, program aspirasi yang direalisasikan melalui desa-desa di wilayah Kabupaten Magelang, Purworejo, Temanggung, Kota Magelang dan Wonosobo itu, adalah untuk membangun desa, sehingga bisa dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat di pedesaan. Dengan begitu, kekuatan sosial politik ada di desa, maka berpengaruh atas peran serta kepala desa beserta aparatnya. (Bag)-f

## DIUSULKAN TPS LOKASI KHUSUS Pada Pemilu Serentak Tahun 2024

**MAGELANG (KR)** - Dalam penataan daerah pemilihan (Dapil) di wilayah Jawa Tengah untuk Pemilu serentak Tahun 2024 mendatang, khususnya untuk DPR RI dan DPRD Provinsi Jateng, tidak ada perubahan, mengingat Dapil Pemilu lalu dianggap masih dapat dilaksanakan. Untuk merubah Dapil konsekuensinya sangat banyak. Demikian dikemukakan Ketua KPU Provinsi Jateng Paulus Widiyantoro kepada wartawan di sela-sela kegiatan Sosialisasi Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPR RI, DPRD Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Kabupaten/Kota se Eks Karesidenan Kedu yang dilaksanakan di Gedung Gotong Royong Bappeda Kabupaten Magelang, Senin (3/4).

Dikatakan, bila berbicara perubahan Dapil tentu akan berbicara bagaimana DPRD yang sekarang menjabat ketika ada perubahan Dapil, tidak hanya kesulitan mereka, tetapi juga menyangkut bagaimana hubungan yang sudah dibangun Dapilnya tentu akan melesap Dapil ini untuk menuju ke Dapil baru. "Maka masyarakat juga akan dirugikan," katanya sambil menambahkan itu merupakan salah satu pertimbangannya dari sekian banyak pertimbangan. Intinya mereka harus terdaftar dahulu di TPS asal, kemudian mengajukan pindah memilih. Kalau dahulu menggunakan Formulir A5, sekarang menggunakan Formulir A Pindah Memilih. Untuk kemudian baru dilayani. "Tetapi tampaknya tidak terlalu banyak permintaan untuk menjadikan TPS Lokasi Khusus," jelasnya. (Tha)-f



KR-Thoha  
Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah saat berbicara di forum sosialisasi.



**ANAK-ANAK Panti Asuhan Al Barokah Semarang belum lama ini berkesempatan berbuka puasa di resto Hotel Neo Simpanglima Semarang. Mereka bersukacita bisa merasakan olahan kuliner hotel dan menerima santunan dari manajemen hotel. Kegiatan ini telah menjadi agenda rutin untuk berbagi keberkahan Ramadan.**

## Nekat Jual Petasan, 90 Orang Dijebloskan ke Penjara

**SEMARANG (KR)** - Polda Jateng bersama jajaran bertindak tegas kepada pihak-pihak yang nekat menjual bahan peledak atau petasan. Dari hasil Operasi Cipta Kondisi menjelang Operasi Ketupat Candi 2023 telah diamankan 90 orang. Hal itu diungkapkan Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi pada gelar kasus hasil Operasi Cipta Kondisi yang berlangsung selama 10 hari dan berakhir 4 April 2023.

Operasi di wilayah hukum Polda Jateng dengan sasaran penyalahgunaan bahan peledak atau petasan, menurut Kapolda telah berhasil mengungkap 58 kasus. Diantaranya diamankan 90 orang tersangka sebagai produsen 15 kasus, distributor 5 kasus dan penjual petasan 38 kasus.

Barang bukti yang disita dari para tersangka tidak hanya petasan berbagai

ukuran mulai terkecil 'rawit' hingga ukuran besar 'bomber'. Selain itu juga bahan/obat pembuat mercon. Yakni, serbuk bahan Petasan 450.650 gram (4,5 kuintal), serbuk aluminium 2.000 gram (2 kg), serbuk belerang berat 25.800 gram (25 kg), Arang 19.300 gram (19 kg), KNO: 500 gram, potasium: 35.000 gram (35 kg), serbuk brom S silver 11.200 gram (11kg).

Kemudian petasan korek 347.800 buah, petasan renteng 7.000 buah, petasan berbagai ukuran: 37.859 buah. Selain itu ada yang masih berbentuk selongsong sebanyak 629 buah, sumbu: 117 lembar serta uang tunai unai Rp. 2.400.000. Menurut Kapolda dilaksanakannya Operasi Cipta kondisi menjelang Operasi Ketupat Candi 2023 tidak lepas adanya kasus ledakan

menonjol di Desa Giriwarno, Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Ledakan hebat ditimbulkan dari bahan mercon terjadi pada Minggu (26/3) malam tidak saja meminta keru-

gian materi 11 rumah rusak, tetapi juga meminta korban seorang tewas dan tiga orang lainnya terluka dan harus menjalani rawat inap di rumah sakit. (Cry)-f



KR-Karyono  
Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi menunjukkan barang bukti petasan.

## Polres Wonogiri Ungkap 7 Kasus Menonjol

**WONOGIRI (KR)** - Tujuh kasus kejahatan menonjol berhasil diungkap anggota Polres Wonogiri dalam waktu dua pekan terakhir. Bahkan dari sejumlah kasus itu ada yang sempat viral di sosmed yakni kasus tabrak lari yang merenggut korban jiwa serta tindak pencabulan yang dialami gadis di bawah umur.

Kapolres Wonogiri AKBP Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah SH SIK MM MSI mengungkapkan hal itu saat menggelar konferensi pers di Mako Polres Wonogiri, Selasa (4/4) sore. Ditegaskan, pihaknya siap meningkatkan operasi dan penindakan secara tegas terhadap pelaku kejahatan di daerahnya agar menimbulkan efek jera.

"Kami mengapresiasi para Kasat di lingkungan Polres Wonogiri yang telah bekerja keras serta cepat sehingga kasus-kasus menonjol dalam dua pekan terakhir berhasil terungkap."

kap," kata Kapolres Wonogiri didampingi Wakapolres Kompol Andi Mohammad Akbar Mekuo SH SIK MH, Kasat Reskrim AKP Supardi SH MH, Kasat Lantas AKP Maryono SH, Kasat Narkoba AKP Subroto SH dan Kasi Humas Polres setempat AKP Anom Prabowo SH MH.

Menurut Indra Waspada, serangkaian kasus yang menarik perhatian masyarakat Wonogiri dan berhasil ditangkap pelakunya adalah tiga kasus narkoba yang terjadi di Kecamatan Selogiri dan Eromoko Wonogiri. "Kita prihatin pelaku penyalahgunaan narkoba di

Eromoko dengan inisial RGP (26) ini masih berstatus pelajar," kata Indra Waspada.

Kasus lain yang dirilis Kapolres Wonogiri adalah kasus laka lantas yakni tabrak lari di wilayah Kecamatan Sidoharjo yang menewaskan pengendara motor. Jajaran satlantas akhirnya berhasil mengamankan pengemudi bus malam 'RI' yang sebelumnya kabur setelah menewaskan pemotor yang dihantamnya. Sopir bis malam, ML (61) warga Karangwang yang dikeler di depan wartawan mengakui terus terang perbuatannya. (Dsh)-f



KR-Djoko Santoso HP  
Polres Wonogiri gelar jumpa pers keberhasilan ungkap kasus.

## Partai Demokrat Minta Perlindungan Hukum

**BOYOLALI (KR)** - Sejumlah pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Boyolali yang dipimpin Direktur Eksekutif DPC Partai Demokrat Boyolali Kasibi meminta perlindungan hukum ke Pengadilan Negeri (PN) Boyolali, Selasa (4/4). Hal tersebut menyusul adanya upaya hukum berupa peninjauan kembali (PK) yang dilakukan Kepala Staf Presiden, Moeldoko, ke Mahkamah Agung.

PK itu diajukan setelah kasasi Moeldoko ditolak MA pada 29 September 2022. Kasasi yang dimaksud mengenai keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, yang menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan kubu Moeldoko hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang. Upaya PK yang dilakukan Moeldoko disinyalir sebagai upaya men-

jegal pasangan Anies Baswedan-Agus Harimurti Yudhoyono (Anies-AHY) dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

Permohonan perlindungan hukum disampaikan segenap pengurus DPC Partai Demokrat Boyolali, kedatangan mereka diterima Ketua PN Boyolali Baskoro di ruang kerjanya. "Kasibi mengatakan Kami bersama teman-teman pengurus DPC ke PN sebagai respons atas pengajuan PK yang dilakukan Pak Moeldoko ke MA. Kami di PN ini untuk meminta perlindungan hukum. Kami, Partai Demokrat Boyolali tidak pecah dan tidak mengakui Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat. Kami ke PN menyampaikan bahwa Demokrat di bawah kepemimpinan AHY yang sah dan ada SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia," ujar Baskoro.

Baskoro menerangkan Demokrat di Boyolali solid dan tidak ada Demokrat tandingan di Boyolali. Terkait dengan adanya sinyal penjejalan pencalonan Anies-AHY, dalam politik, menurutnya strategi bisa dilakukan dengan beragam cara, yang benar dan kurang benar. Dinyatakan dengan adanya polemik di internal partai ini justru akan membuat Partai Demokrat solid, lebih menguatkan, dan lebih kokoh karena sudah melewati ujian-ujian.

"Materi PK itu sudah dipelajari teman-teman di Partai Demokrat. Kami memprediksi novum yang dibawa untuk PK itu masih kurang. Kami percaya diri bahwa PK itu akan sia-sia. Dari empat novum yang diajukan, dua di antaranya pernah diajukan dalam Kasasi," katanya.

Ketua PN Boyolali Baskoro, menerima surat permohonan perlindungan

hukum dari DPC Partai Demokrat Boyolali. Dia mengaku belum bisa memahami perkara yang diajukan untuk mendapatkan perlindungan hukum karena berkas-berkas putusan sebelumnya belum disampaikan.

Baskoro meminta pengurus DPC Partai Demokrat Boyolali membawa putusan-putusan terkait perkara di MA itu ke PN Boyolali. "Putusannya ba-

gaimana, siapa dengan siapa, sehingga kami bisa memahami isinya. Kendati demikian, kami tetap menerima permohonan dari DPC Partai Demokrat Boyolali," katanya. Dijelaskan, PK itu merupakan upaya hukum luar biasa karena adanya novum atau temuan bukti baru. Dia mengungkapkan itu nanti yang menyidangkan ada istilahnya hakim PK." jelasnya. (R-3)-f



KR-Mulyawan  
Pengurus Partai Demokrat Boyolali Saat di Pengadilan Negeri Boyolali.